e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

SULTAN ABDUL QAHIR DAN PELETAKAN DASAR SOSIAL POLITIK ISLAM AWAL DI BIMA TAHUN 1601-1640

Oleh:
Abi Mas Tanjung[1], Muhamad Husni[2], Suryanti[3]
[1,2,3]Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya
(Email korespondensi: abimastanjung419@gmail.com)

Abstract

This study discusses the role of Sultan Abdul Qahir in developing Islam in Bima in 1630-1635 AD. This study aims to: (1) explain the background of Sultan Abdul Qahir's life. (2) explain the results of Sultan Abdul Qahir's contributions in terms of da'wah, politics, social, and economics. This study uses historical methods, including Topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that: (I) The Bima Kingdom had been established and developed before the period covered by BO (Book of Records of the Kings of Bima), and had developed good politics and culture through trade. (2) During the Sultanate of Abdul Qahir, Bima became a trade centre, so the community utilised this to spread Islam. (3) Sultan Abdul Qahir's success in the field of da'wah and culture can be seen from several aspects; in the field of da'wah, Sultan Abdul Qahir succeeded in building the first mosque, namely the Kamina Mosque, which was used as a means of da'wah and education. In the cultural field, the Rimpu dress, a garment that complies with Islamic law, has been successfully created, covering the entire body of Muslim women in Bima. The difference between previous research and this study is that Nurwahidah (2019) wrote that Sultan Abdul Qahir converted to Islam in Sape Village while fleeing Salisih (Abdul Qahir's uncle), while the BO (Book of Records of the Kings of Bima) manuscript records that Sultan Abdul Qahir converted to Islam in Makassar while being pursued by Salisih. This researcher seeks to deepen and complement the findings of previous researchers, namely the issue of Sultan Abdul Qahir's journey from his conversion to Islam to his earlier life.

Keywords: History of Sultan Abdul Qahir's role, Sultan Abdul Qahir's contribution

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peranan Sultan Abdul Qahir dalam mengembangkan Islam di Bima Tahun 1630-1635 M. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) latar belakang kehidupan Sultan Abdul Qahir. (2) kontribusi Sultan Abdul Qahir dari segi dakwah, politik, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah di antaranya: Pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (I) Kerajaan Bima telah berdiri dan berkembang sebelum masa yang diliputi *BO* (Buku Catatan Raja-raja Bima), dan sempat mengembangkan sebuah politik dan budaya yang baik melalui perniagaan. (2) Pada masa Kesultanan Abdul Qahir, Bima menjadi pusat perdagangan sehingga masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarkan Islam. (3) kesuksesan Sultan Abdul Qahir dalam bidang dakwah dan kebudayaan dilihat dari beberapa aspek; di bidang dakwah, Sultan Abdul Qahir berhasil membangun masjid pertama yaitu Masjid Kamina yang dijadikan sebagai sarana dakwah dan pendidikan. Di bidang kebudayaan, tercipta pakaian yang sesuai syari'at Islam yaitu busana Rimpu untuk menutupi tubuh wanita muslimah. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini yakni, Nurwahidah (2019) menuliskan bahwa Sultan Abdul Qahir masuk Islam di Desa Sape saat melakukan pelarian dari kejaran Salisih (paman Abdul Qahir), sedangkan dalam naskah *BO* (Buku catatan Raja-raja Bima) tercatat bahwa Sultan Abdul Qahir masuk Islam di Makassar ketika dalam pengejaran Salisih. Peneliti berupaya mendalami dan melengkapi temuan para peneliti sebelumnya yaitu permasalahan perjalanan Sultan Abdul Qahir mulai dari masuk Islam serta kehidupan sebelumnya.

Kata Kunci: Sejarah Peranan Sultan Abdul Qahir, Kontribusi Sultan Abdul Qahir

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

1. PENDAHULUAN

Kerajaan Bima telah berdiri dan berkembang jauh sebelum periode yang tercatat dalam Naskah *Bo' Sangaji Kai (Naskah BO)*. Pada masa tersebut, kerajaan ini telah mencapai kemajuan yang tinggi dalam bidang politik dan kebudayaan berkat kemakmuran yang diperoleh dari aktivitas perdagangan. Letak geografis Bima yang strategis, berada di jalur maritim utama yang melintasi Kepulauan Indonesia, menjadikannya sebagai salah satu pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan antara Malaka dan Maluku. Berbagai peninggalan arkeologis, prasasti, serta kutipan dari naskah Jawa kuno seperti Nagara Kertagama dan Pararaton menunjukkan bahwa Pelabuhan Bima telah dikenal dan dikunjungi sejak sekitar abad ke-10 M. Ketika bangsa Portugis mulai menjelajahi Kepulauan Nusantara, Bima telah berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan yang signifikan. Pada dekade kedua abad ke-16 M, Tome Pires bahkan memberikan gambaran mengenai kondisi Bima pada masa itu "Pulau Bima adalah Pulau yang diperintah oleh Raja Kafir" (Corsetao, I: 2 03).

Seratus tahun kemudian, orang-orang Belanda melakukan pendataan kepada kapal-kapal yang berlabuh di Batavia (Jakarta) dan di Ambon, membawa barang dagangan yang diperoleh dari Kerajaan Bima, yaitu kayu sapang, beras, bahan lilin, kayu cendana, asam, balerang, kayu manis, gula jawa, serta budak (Lih. Dagh Register tahun 1624-1665).

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Bima telah berhubungan dengan Ambon, Banjar, Makassar, Banten, Palembang, dan bahkan China. Catatan lain menyebutkan barang dagangan lain lagi seperti: Kain tenunan, kuda, kerbau, bawang bombai, kacang hijau dan ganitri. Pada masa itu, masyarakat dan Kerajaan Bima sedang mengalami perubahan yang sangat penting karena diislamkan oleh Gowa pada tahun 1618-1619 (Noorduyn 1987a).

Lima puluh tahun kemudian, Kerajaan Bima harus belutut pada kekuasaan kompeni ketika kerajaan kembar Gowa-Tallo memeluk agama Islam pada tahun 1605-1607. Peristiwa ini merupakan hasil konflik politik (peperangan yang terus-menerus) dan suatu masalah agama yaitu raja-raja Sulawesi yang ragu akan masuk agama Islam atau Kristen. Selanjutnya Makassar mengislamkan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan kemudian di Pulau Sumbawa sehingga sampai kepada La Kai (Sultan Abdul Qahir). Bahasa penyebaran agama Islam adalah bahasa Melayu. Beberapa waktu kemudian, mitos kerajaan pun dirombak dan ditulis kembali yaitu *Ceritera Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa* (Lih. Chambert-Loir 1985: 49,55).

Bima kemudian menjadi bagian dari kebudayaan Melayu dan dalam konteks yang lebih luas, termasuk ke dalam komunitas umat Islam, sebuah jaringan sosial dan kultural yang melampaui hubungan dagang yang telah dikenal sebelumnya. Masa pemerintahan Sultan Abdul Qahir sendiri hanya sedikit diketahui, terutama setelah Bima mengalami kekalahan dua kali dari armada Makassar pada tahun 1618-1619. Sejak saat itu, Bima berada di bawah kekuasaan Makassar dan diwajibkan membayar upeti setiap tahun sebagai tanda ketundukan, sehingga dianggap sebagai "budak" Makassar (Noorduyn 1987a: 317, 319).

2. METODE PENELITIAN

Sultan Abdul Qahir merupakan sultan pertama Kerajaan Bima yang lahir pada tahun 1020 H atau 1601 M. Ia adalah putra sulung dari Mantau Asi Sawo, keturunan yang merupakan putra Sangaji Manggompo, cucu Maharaja Bima Indra Seri, cicit Batara Indra Luka, dan keturunan Batara Indra Manggampo dari Jawa, yang silsilahnya berlanjut hingga mencapai Raja Sang Bima. Adapun nama ibunda Sultan Abdul Qahir tidak disebutkan dalam silsilah Raja-Raja Bima yang tercantum dalam *Naskah BO* (Naskah Kuno Bima). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Lokasi penelitian di Museum Asi Mbojo dan Makam kesultanan di Bima. Objek penelitian ini yakni peranan kesultanan Bima Abdul Qahir dalam mengembangkan Islam di Bima pada tahun (1630-1635). Oleh sebab itu, maka diperlukan dua jenis data yaitu primer dan sekunder untuk penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Hal ini dikemukakan oleh Kuntowijoyo dalam

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

publikasinya tahun 2013. Mekanisme operasional yaitu metode historis melalui pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

3. PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Kehidupan Sultan Abdul Qahir tahun 1601

Latar belakang Sultan Abdul Qahir disebutkan menjadi dua yaitu: (a) Sebelum Abdul Qahir naik takhta. Kehidupan Sultan Abdul Qahir diwarnai oleh berbagai ujian dan pergolakan politik yang cukup panjang. Ia lahir pada tahun 1601 M dan kemudian dikenal sebagai sultan pertama Bima tahun 1630 M yang menerima serta menyebarkan agama Islam. Sebelum masa pemerintahannya, Kerajaan Bima sempat mengalami kemunduran; kejayaan dan kemegahan kerajaan terhenti sementara, seolah cahaya kerajaan tertutup oleh kegelapan akibat konflik internal yang melanda. Krisis politik tersebut dipicu oleh tindakan seorang tokoh bernama Salisih, yang merupakan paman Abdul Qahir sendiri. Berdasarkan adat yang berlaku, *Salisih* tidak memiliki hak untuk mewarisi takhta karena masih ada putra raja yang sah sebagai pewaris. Namun, dorongan ambisi untuk merebut kekuasaan membuat Salisih bertindak kejam dengan membunuh saudara-saudaranya sendiri, yakni Samawa dan La Sawo. Kekejamannya belum berhenti di situ, sebab ia juga berusaha menghabisi La Kai (nama kecil Abdul Qahir), yang merupakan pewaris sah kerajaan. Untuk menyelamatkan diri, Abdul Qahir melarikan diri ke pedalaman, berpindah dari Dusun Teke menuju Kalodu hingga akhirnya tiba di Desa Sape. Dalam pelariannya, ia menghadapi berbagai cobaan berat yang justru membentuk keteguhan dan kebijaksanaannya. Pada masa pengasingan tersebut, Abdul Qahir bertemu dengan para mubaligh dari Gowa yang kemudian membimbingnya memeluk agama Islam. Pertemuan ini menjadi titik balik penting dalam kehidupannya, karena selain memperkuat keimanannya, Abdul Qahir juga mulai merancang strategi untuk merebut kembali Kerajaan Bima dan memulihkan kejayaannya sebagai sultan yang sah (Abdullah Achmad BA, *Kerajaan Bima dan Keberadaanya* Cet I; Raba-Bima: perpustakaan nasional, 1992).

Salisih yang haus kekuasaan mempunyai banyak rencana untuk membunuh Abdul Qahir agar bisa menduduki posisi raja. Untuk menghindari perselisihannya terhadap pamanya Salisih, Abdul Qahir meminta bantuan kepada Sultan Alauddin untuk memerangi kerajaan Bima dari kepemimpinan Salisih. Setelah kerajaan Gowa mengirimkan pasukannya, Abdul Qahir memulai peperangan terhadap Raja Salisih selama dua hari, akan tetapi Abdul Qahir dan pasukannya mengalami kekalahan dan melarikan diri lagi ke Makassar. Pelariannya melewati jalur Pelabuhan Sape dengan menggunakan perahu yang hanya mengandalkan arah angin yang sangat kencang dan mendarat di daerah Bantaeng (*BO* Tanah Bima; *Naskah Arab Melayu Peninggalan Kesultanan Bima, hal. 44).*

Di Makassar, mereka tinggal di istana dan mendalami ajaran Islam di bawah bimbingan dua ulama terkemuka Sulawesi Selatan, yakni Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai penyebar agama Islam yang berpengaruh di kawasan tersebut. Sementara itu, Lambila memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pengetahuan umum serta mempelajari strategi dan taktik militer kepada Karaeng Bantonompo, panglima Kerajaan Gowa yang baru di bawah pemerintahan Sultan Malikus Said (1639-1640). Setelah belajar merekapun berangkat dan menyiapkan pasukan di Kerajaan Gowa. Pada saat itu juga Abdul Qahir adalah mantu dari dai adiknya pemaisuri Sultan Alauddin. Mereka berangkat menggunakan perahu dan memulai peperangan dengan pasukan "*Rumata Mabata Wadu".* Dalam peperangan tersebut Abdul Qahir dan pasukanya mengalami kemenangan, sedangkan Salisih melakukan pelarian karena terdesak dan akhirnya tinggal di pedalaman ke Desa Seli dan menetap di sana sampai wafat (Ahmad Amin, *Ringkasan Sejarah Bima.* "Bima: Kantor Kebudayaan Bima, 1971, h. 49).

Selanjutnya yaitu: (b) Abdul Qahir menjadi sultan; proses pengangkatan seorang sultan di daerah Bima dilakukan melalui proses pemilihan. Dengan proses pemilihan tersebut maka calon pengganti sultan akan dipilih oleh raja atau majelis adat bersama majelis hukum. Setelah dilantik menjadi raja

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

(sultan) maka Abdul Qahir melakukan perannya sebagai sultan yaitu dengan membangun pemerintahan yang baik, serta membangun pendidikan dengan upaya atau sekaligus untuk menyebarkan agama Islam. Saat pelantikan sultan, para *Ncuhi* (ketua suku) dengan kapak yang berada di tangan mengucapkan sumpah serapah dan mengancam sang sultan jika sultan tidak mengabdikan dirinya demi kesejahteraan rakyat dan negerinya. *Ncuhi* yang hadir pada saat itu mengucapkan kata-kata yang harus diikuti oleh Sultan Abdul Qahir *"Nggomi Nalaisi Nggahi La'o rawimu akeku ponggo dimambi'a wea tutamu"* (Jika apa yang kau sampaikan dan perbuatanmu tidak selaras, maka inilah kapak yang akan membelah dua kepalamu) (Ahmad Amin, *Sejarah Bima; Pemerintahan dan serba serbi kebudayaan.* Bima; kepala bidang kebudayaan Bima, 1971, h. 21).

Itu adalah ucapan para *Ncuhi* dari zaman kerajaan pertama Sang Bima sampai sultan terakhir Hasanudin. Tradisi ini sudah lama dilakukan sejak zaman raja pertama Bima sebagai tanda bukti bahwa raja tersebut sudah menjadi raja. Kata-kata tersebut memang tergolong kasar jika didengar dalam konteks sekarang akan tetapi pada masa kerajaan, perkataan tersebut memiliki makna yang dalam terhadap raja-raja Bima. Maknanya bahwa para raja tidak akan melanggar janjinya ketika sudah memimpin. Setelah prosesi pelantikan selesai, acara dilanjutkan dengan penyampaian pidato oleh sultan. Usai pidato tersebut, para *Ncuhi* kemudian menyerahkan keris jabatan kepada sultan sebagai simbol penyerahan kekuasaan dan legitimasi kepemimpinan. Maksud dari keris tersebut yaitu bahwa kerajaan Bima memang memiliki keris jabatan dari kerajaan sebagai tanda kekuasaan karena simbol kerajaan Bima berupa keris.



(Gambar 1. Keris Sampa Raja abad ke 16/sumber: dok.peneliti)

Keris ini ditempa dan dibuat pada sekitar abad ke 16 M di masa pemerintahan Indra Zamrud dan di gagangnya terdapat ukiran sang Bima. Sang raja yang memimpin Bim diberi mahkota di atas kepala dan diberi payung lontar. Payung lontar merupakan lambang kebesaran yang dibuat dari daun lontar yang pucuk serta pinggirannya berhiaskan emas. Payung tersebut merupakan simbol sultan yang berperang "untuk melindungi dan mengayomi rakyat dan negerinya". Dalam kesehariannya sultan dipanggil "Hawo Ro Ninu" yang berarti pengayom dan pelindung. Saat pelantikan tersebut, para pejabat melakukan penyembahan kepada Abdul Qahir yang dilantik menjadi sultan. Menyembah sang raja yang telah menduduki tahkta mempunyai makna yang dalam, yaitu sang raja akan setia terhadap negara dan rakyatnya. (Abdullah Achmad BA, *Kerajaan Bima dan Kebudayaan.* Cet I: Raba-Bima: perpustakaan Nasional, 1992).

3.3.2 Kontribusi Sultan Abdul Qahir dalam Mengembangkan Islam di Bima

Masyarakat Bima pada masa kesultanan melakukan perniagaan serta melakukan penyebaran agama. Tome Pires menggambarkan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi pada masa itu dengan cukup rinci. Ia menjelaskan bahwa karena para pedagang memiliki modal yang

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

terbatas dan sebagian besar awak kapalnya merupakan budak, mereka memperpanjang rute pelayaran guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dari Malaka, para pedagang membawa berbagai barang untuk dijual di Jawa. Setelah itu, mereka membeli komoditas lain di Jawa untuk kemudian diperdagangkan di Bima dan Sumbawa. Di wilayah tersebut, mereka juga memperoleh kain yang kemudian dijual di Banda dan Maluku, bersama dengan sisa barang-barang yang sebelumnya dibawa dari Malaka (*Ibid:* 220). Selain situasi masyarakat dalam perdagangan terdapat juga (a) situasi ekonomi (b) situasi sosial (c) situasi politik.

a. Situasi Ekonomi

Masyarakat Bima memiliki perekonomian yang cukup maju, dengan pertanian sebagai acuan untuk sektor utama. Mereka menanam berbagai bahan pangan yaitu menanam padi, jagung, kacang hijau, bawang, dan kemiri. Tanaman tersebut untuk meningkatkan jangkauan perdagangan dengan daerah lain, serta untuk dieskpor ke kota-kota lain (*Lih. Dagh Register tahun 1624-1665).*

Pada masa pemerintahan Raja Ma Wa'a Longge, (Ma Wa'a Longge adalah gelar yang diberikan kepada Sultan Abdul Qahir), Kerajaan Bima mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Gowa. Pada periode tersebut, Bima juga mulai menerapkan sistem pencetakan sawah sebagai bagian dari pengembangan sektor pertanian. Memasuki abad ke-16, setelah *Raja Ma Wa'a Longge* turun dari tahtanya pada tahun 1612, Bima berkembang menjadi salah satu daerah penghasil dan penyimpan beras utama di Indonesia. Komoditas beras pada masa itu memiliki peranan penting dalam sistem barter dan perdagangan antardaerah, sehingga menempatkan Bima dalam jalur utama peta perdagangan nusantara. Sejak saat itu pula, nama Bima mulai tercatat dalam berbagai jurnal pelayaran bangsa Portugis, Belanda, serta para pedagang dari Jawa (Tawalinuddin Haris, Kerajaan Tradisional di Nusantara (Bima,), h. 70-71).

Aspek pertanian orang Bima didukung oleh peternakan yang mempunyai kontribusi terhadap perdagangan masyarakat Bima. Kuda Bima adalah salah satu jenis kuda yang baik di Indonesia. Meskipun bertubuh kecil, kuda Bima dapat memikul banyak beban yang berat. Selain sektor perdagangan dan pertanian, perekonomian Bima juga ditopang oleh hasil hutan yang melimpah. Wilayah dataran tinggi dan pegunungan di Bima dipenuhi oleh berbagai jenis vegetasi lebat, terutama pohon asam dan jati. Selain itu, terdapat pula pohon sapan, jarak, bingkuru, serta kenari yang tumbuh subur di kawasan tersebut. Kayu sapan, khususnya, menjadi salah satu komoditas penting karena jumlahnya yang melimpah dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Melihat potensi tersebut, Cornelis Speelman seorang Gubernur Jenderal VOC yang menjabat antara tahun 1681 hingga 1684 dan dikenal sebagai penakluk Kesultanan Gowa-Tallo melalui Perjanjian Bongaya, menunjukkan minat besar terhadap komoditas ini. Pada tahun 1669, Speelman membuat perjanjian dagang dengan Sultan Bima yang kemudian diperbarui pada tahun 1765. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa hanya VOC yang memiliki hak untuk membeli dan menguasai perdagangan kayu sapan dari wilayah Bima (Taufiqurrahman, *Sejarah Pelabuhan Bima.* Unhas, Skripsi: 2010. h. 59-60).

Potensi alam yang dimiliki Bima memiliki kaitan erat dengan perkembangan aktivitas pelabuhan pada masa itu. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah diangkut keluar wilayah melalui pelabuhan, dengan berbagai produk yang menjadi komoditas perdagangan antarpulau. Pertumbuhan ekonomi di Bima berlangsung seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan dan pelayaran, di mana komoditas yang diperdagangkan mencakup hasil dari sektor pertanian, perdagangan, peternakan, serta perikanan yang berasal dari daerah-daerah sekitarnya. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa peran aktif masyarakat juga sangat besar dalam menunjang keberlangsungan dan kemajuan aktivitas pelabuhan tersebut. Pembangunan di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil signifikan pada masa pemerintahan *Manggampo Donggo*, pada masa inilah Bima berhasil berkembang menjadi salah satu pusat produksi dan penyimpanan beras utama di kawasan selatan Nusantara. Komoditas beras memainkan peran strategis sebagai mata rantai penghubung

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

antara sumber rempah-rempah di Maluku dengan pasar internasional di Malaka, yang menjadikan keberadaan pelabuhan di wilayah Jawa semakin penting. Meningkatnya permintaan rempah-rempah pada masa itu juga mendorong kebutuhan akan persediaan beras dalam jumlah besar. Produksi beras di Jawa sendiri belum mampu mencukupi kebutuhan pasar yang terus meningkat, sehingga kekurangannya harus dipenuhi dari daerah lain. Dalam konteks ini, Kerajaan Bima muncul sebagai produsen dan pengelola beras utama di kawasan selatan yang mendapat perhatian dari berbagai wilayah lain. Posisi geografis Bima yang strategis dan terletak di antara jalur perdagangan Jawa dan Maluku, menjadikan peran dan kedudukan Bima semakin penting dalam jaringan perdagangan nusantara (Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* h. 103).

Pada masa itu, Bima berperan penting sebagai jalur lintas pelayaran dan perdagangan antara Malaka dan Maluku, yang menjadikannya salah satu pusat aktivitas ekonomi yang strategis di kawasan timur Nusantara. Sebagai bandar niaga, Bima terletak di sebuah teluk yang terlindung secara alami oleh perbukitan di sekitarnya, menjadikannya pelabuhan yang aman bagi kapal-kapal yang berlabuh maupun berlayar keluar. Kondisi geografis ini memungkinkan kapal tetap terlindung dari hempasan gelombang besar, baik ketika angin muson bertiup dari arah barat laut, timur, maupun tenggara. Selain keunggulan letaknya yang strategis, Bima juga berperan sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kota bandar yang ramai. Keberadaannya didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, baik yang berasal dari wilayah Bima sendiri maupun dari daerah-daerah sekitarnya. Faktor-faktor tersebut menjadikan Bima tidak hanya sebagai simpul perdagangan penting, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki peranan besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di kawasan timur Indonesia pada masa itu. Bima memiliki sumber air yang cukup bersih serta ketersediaan bahan makanan seperti daging dan ikan yang mudah diperoleh, sehingga wilayah ini menjadi tempat persinggahan ideal bagi para pelaut untuk mempersiapkan bekal sebelum melanjutkan pelayaran. Selain itu, Bima juga berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan yang menghubungkan berbagai daerah di sekitarnya. Wilayah ini menghasilkan beragam produk perdagangan, antara lain kain kasar, budak, kuda, kayu celup (*dye wood*), serta hasil bumi lainnya seperti kacang-kacangan dan beras. Sejak abad ke-17, Pelabuhan Bima telah dikenal luas sebagai salah satu pelabuhan penting di kawasan timur Nusantara. Pelabuhan ini kerap disinggahi oleh para pedagang dari kawasan Melayu maupun dari berbagai wilayah lain di Indonesia, menjadikannya salah satu simpul penting dalam jaringan perdagangan maritim pada masa itu (Taufiqurraahman, *Sejarah Pelabuhan Bima.* h.33).

b. Situasi Politik

Terkait situasi politik masyarakat Bima pada zaman Sultan Abdul Qahir, terdapat beberapa penerapan (a) penerapan hukum Islam; Sultan Abdul Qahir menerapkan hukum Islam dalam kepemerintahannya. Abdul Qahir menerapkan atau mendirikan hukum "Syara" atau "Mahkamah Tussara'iyah" untuk mengatur kehidupan masyarakat Bima berdasarkan hukum syariat Islam. (b) pengaruh terhadap masyarakat; penerapan hukum Islam dan pengembangan pendidikan agama Islam yang berdampak signifikan pada masyarakat Bima. Masyarakat juga mulai meninggalkan adat-istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Abdul Qahir merupakan sultan pertama dalam sejarah Kerajaan Bima. Ia diangkat menjadi raja pada tahun 1030 H (1620 M) oleh Raja Gowa, dan sejak saat itu Bima secara resmi bertransformasi menjadi kerajaan Islam. Masuknya Sultan Abdul Qahir ke dalam agama Islam berawal dari kedatangan para mubaligh yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Bima. Namun, menurut sumber lain, Islam diterima oleh Abdul Qahir ketika ia berada di Kerajaan Gowa setelah melarikan diri dari kejaran Salisih dan para pengikutnya. Selama berada di Gowa, Sultan Abdul Qahir tidak hanya belajar agama dari para mubaligh, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang ajaran dan peran Islam dalam pemerintahan bersama Sultan Alauddin. Ia menetap di lingkungan istana Makassar selama kurang lebih 19 tahun, dan kemudian menikah dengan *Daeng Sikontu*, adik dari

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

permaisuri Sultan Alauddin. Setelah itu, *Rumata Ma Bata* gelar lain dari Abdul Qahir secara resmi dilantik sebagai raja Islam pertama Bima pada tahun 1050 H dengan gelar Sultan. Pada masa awal pemerintahan Sultan Abdul Qahir, masyarakat Bima sebagian besar masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, dengan masuk Islamnya sang raja, perlahan-lahan masyarakat mulai mengikuti keyakinan tersebut. Hal ini sejalan dengan sistem sosial-kerajaan yang berlaku, di mana rakyat cenderung mengikuti agama yang dianut oleh pemimpinnya. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang pesat di Bima dan menjadi pedoman utama kehidupan masyarakatnya. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menolak ajaran baru tersebut, dan mereka kemudian memilih untuk berpindah ke daerah pegunungan yang kini dikenal sebagai "*Dou Donggo*," yang secara harfiah berarti "orang gunung." (Anadaya 1981: 280-289).

Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat mereka mengganti namanya dengan nama Islam:

1. *La Kai Rumata Mabata Wadu* diganti menjadi (Abdul Qahir)
2. *La Mbila* diganti menjadi (Jalaluddin)
3. *Rumu Jene Jara Sape* diganti menjadi (Awaluddin)
4. *Manuru Bata,* dia tidak dijelaskan namanya, dan kemungkinan menjadi Sultan Dompu yang pertama.

Setelah keempat keluarga kerajaan mengucapkan dua kalimat syahadat, semakin banyak pengikut yang kemudian memeluk agama Islam. Dalam catatan resmi Kerajaan Bima (*Naskah BO*), disebutkan nama-nama tokoh yang turut memeluk Islam, antara lain: Sahada beserta saudaranya*, Wahyu Kami, Ompu Subu, Ama Dini, Ama Nawa, Ompu Saniba, Ompu Tambe, Ompu Tuwu, Ompu Kakapi,* dan *Si Naha*. Setelah peristiwa tersebut, dilaksanakan prosesi khitanan bagi keempat keluarga kerajaan beserta para pengikutnya sebagai simbol penerimaan ajaran Islam secara resmi. Sejak saat itu, agama Islam diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari komitmen kerajaan terhadap keyakinan baru tersebut. Untuk mempertegas tekad dan kesetiaan mereka, para anggota keluarga kerajaan mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad Saw. Dalam prosesi sakral ini, mereka mengiris tangan masing-masing dan meminum darahnya sendiri sebagai tanda sumpah yang disebut "*Sumpah Raba Parapi."* Istilah ini berasal dari kata *raba* yang berarti bendungan dan *parapi* yang berarti tempat, merujuk pada lokasi tempat sumpah tersebut diucapkan. Peristiwa penting ini dicatat secara rinci dalam *Naskah BO* sebagai salah satu momen bersejarah dalam proses islamisasi Kerajaan Bima. Dalam sumber tradisi lain di antara isi pokok sumpah parapi dikatakan bahwa:

1. Memperkukuh kesetiaan kepada putra mahkota (Sultan Abdul Qahir)
2. Masyarakat tidak boleh tunduk pada kepemerintahan orang lain, termasuk kepemerintahan raja *Salisih* (Rumata Mantau Asi Peka)
3. Anak cucu dan keturunan mereka akan terikat dengan sumpah itu
4. Apabila ada yang melanggar sumpah itu sama hal dengan meminum racun.

Setelah selesai mengucapkan sumpah tersebut, Sultan Abdul Qahir bersama para pengikutnya dan guru-gurunya dari Kerajaan Gowa meninggalkan Raba Parapi menuju tempat persembunyian di Desa Kalodu. Di tempat itu, mereka melanjutkan dakwah Islam dengan mengislamkan penduduk setempat serta mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Kamina. Masjid ini kemudian dikenal sebagai masjid pertama dalam sejarah Kerajaan Bima dan menjadi simbol awal berkembangnya ajaran Islam di wilayah tersebut (H. Abdullah Tayeb, *Perjuangan Bersejarah Phase II Bima* (Bima: 1980, hal. 80).

c. Situasi Sosial

Pada masa itu, masyarakat Bima masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, sebelum kemudian mengalami transisi menuju agama Islam. Penduduk Bima terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Setiap wilayah memiliki struktur sosial

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

dan sistem organisasi budayanya sendiri, termasuk dalam hal pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat. Pada masa peralihan menuju Islam tersebut, struktur sosial masyarakat Bima masih dipimpin oleh para kepala suku yang dikenal dengan sebutan *Ncuhi*. Jabatan sebagai *Ncuhi* hanya dapat dipegang oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan, kewibawaan, dan pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Setiap *Ncuhi* memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, yang dikelolanya secara otonom namun tetap menjadi bagian dari tatanan sosial dan politik masyarakat Bima secara keseluruhan. Para *Ncuhi* tersebut antara lain:

1. *Ncuhi* Panggapupa yang memegang wilayah Bima Timur
2. *Ncuhi* Dorowani yang memegang wilayah Bima Utara
3. *Ncuhi* Parewa yang memegang wilayah Bima Selatan
4. *Ncuhi* Bolo yang memegang wilayah Bima Barat
5. *Ncuhi* Dara yang memegang wilayah Bima Tengah yang bertindak sekaligus pemimpin para *Ncuhi* semua wilayah.

Keberadaan para *Ncuhi* membuat kehidupan masyarakat Bima menjadi aman terkendali. Pada abad ke 17 M pengaruh Islam semakin meluas. Setelah kesultanan pertama dilantik, maka Abdul Qahir melakukan penyebaran Islam di Bima dengan melakukan perannya sebagai sultan yang memegang kekuasaan tertinggi di Bima sehingga melakukan beberapa langkah (Abdullah Achmad BA, *Kerajaan Bima dan Kebudayaan.* Cet I: Raba-Bima: Perpustakaan Nasional, 1992).



(Gambar 2. Masjid Kamina di Desa Kalodu/sumber; dok.peneliti)

Sultan Abdul Qahir melakukan beberapa langkah agar Islam bisa tersebar luas di Bima, yaitu dengan mendirikan masjid yang bernama Masjid Kamina. Masjid Kamina dibangun pada tahun 1621 M. Masjid tersebut merupakan salah satu sarana yang baik dalam rangka mengembangkan dan melakukan syi'ar Islam di Bima. Secara geografis, masjid tersebut berbatasan langsung dengan beberapa wilayah; di sebelah utara berbatasan dengan Desa Raba, di sebelah timur dengan Desa Mangge, di sebelah selatan dengan Desa Karumbu, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kamulu. Masjid Kamina masih berdiri hingga saat ini dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Bima. Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan syiar Islam, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan, khususnya untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam bagi masyarakat setempat (Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo.* H. 112).

Selain membangun masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, Sultan Abdul Qahir juga memanfaatkan pendekatan politik sebagai sarana Islamisasi di Bima. Proses penyebaran Islam dimulai melalui sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai ajaran Islam sebagai jalan hidup yang baru. Upaya sosialisasi ini dianggap sangat penting karena berfungsi sebagai

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

media untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Sultan Abdul Qahir dikenal sebagai pemimpin yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan rakyatnya. Sikapnya yang ramah, terbuka, dan peduli terhadap masyarakat membuat banyak orang merasa dekat dan menghormatinya. Hal tersebut berkontribusi besar terhadap keberhasilan proses Islamisasi di Bima, karena masyarakat tidak hanya tertarik pada ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga pada keteladanan dan kepemimpinan Sultan Abdul Qahir (Syarifuddin Jurdi, *Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima: Pendekatan Historis, Sosiologis, dan Politis.* Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2011, h. 56).

Selain karena kepribadiannya yang luhur, Sultan Abdul Qahir juga berperan aktif dalam memperkuat kerja sama dengan berbagai kerajaan Islam di wilayah sekitarnya. Dalam upaya membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Kerajaan Bima menjalin hubungan erat dengan beberapa kerajaan Islam lain yang telah lebih dahulu berdiri, seperti Kesultanan Tallo, Gowa, Bone, dan Luwu. Melalui hubungan diplomatik dan kerja sama tersebut, terjadi proses akulturasi budaya antara Bima dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Akulturasi ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pembentukan sistem budaya yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hasil dari proses ini menjadikan Islam tidak hanya sebagai agama resmi Kerajaan Bima, tetapi juga sebagai landasan moral dan kultural yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan masyarakatnya (Syarifuddin Jurdi, *Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima: Pendekatan Historis, Sisiologis, dan Politis.* H. 95).
Dengan masuk dan berkembangnya pengaruh Islam dalam kehidupanya masyarakat Bima, bermunculan berbagai variasi ragam budaya lokal, seperti Rimpu.

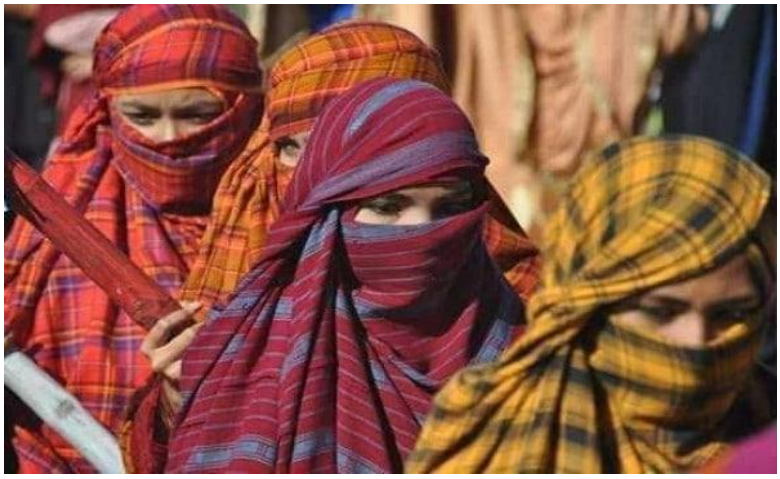

(Gambar 3. Pakaian Busana Rimpu/sumber: dok.peneliti)

Rimpu merupakan pakaian adat Bima yang dipakai oleh perempuan muslimah di Bima. Rimpu dikembangkan dan diperketat oleh Abdul Qahir. Selain dikarenakan syari'at untuk menutupi aurat ini juga untuk melindungi muslimah dari gangguan Belanda, sehingga pada saat itu perempuan muslimah diwajibkan memakainya. Oleh karenanya, Rimpu disebut budaya lokal yang bercorak Islam. Hal lain yang dipengaruhi oleh budaya Islam di Bima dapat terlihat jelas dalam berbagai upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bima, seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian. Dalam setiap prosesi tersebut, nilai-nilai Islam berpadu dengan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya, menciptakan bentuk budaya baru yang khas. Perpaduan ini mencerminkan adanya hubungan yang harmonis antara ajaran Islam dan budaya lokal masyarakat Bima. Misalnya, dalam upacara kelahiran dan khitan, doa-doa Islam dibacakan namun tetap disertai dengan tradisi adat seperti pemberian nama atau jamuan kepada masyarakat sekitar. Begitu pula dalam upacara perkawinan dan kematian, nilai-nilai Islam menjadi dasar utama pelaksanaannya,

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

tetapi tetap mengandung unsur kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Bima tidak menghapus budaya lama sepenuhnya, melainkan mengintegrasikannya dengan ajaran Islam sehingga melahirkan identitas keislaman yang khas dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. (M. Hillir Ismail, *Menggali Pusaka Terpendam*, *Butiran-Butiran Mutiara Budaya Mbojo*, Bima: 2001, h. 18).

Ketika agama Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan pada tahun 1621 M, para ulama berhasil menanamkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Bima. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam sistem etika dan moral yang dikenal dengan *Maja Labo Dahu*, yang berarti *malu dan takut*. Dalam pandangan Islam, *Maja Labo Dahu* mencerminkan dua sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman dan bertakwa. *Maja* atau rasa malu merupakan wujud kesadaran diri untuk menjauhi perbuatan tercela dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Sementara *Dahu*, yang berarti takut, merujuk pada rasa takut kepada Allah Swt., sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri agar senantiasa berada di jalan yang benar. Bagi masyarakat *Dana Mbojo* pada masa lampau, nilai *Maja Labo Dahu* bukan sekadar norma sosial, tetapi dianggap sebagai pusaka moral yang sangat berharga dan diwariskan secara turun-temurun. Prinsip ini menjadi pedoman dalam bertingkah laku, bermasyarakat, dan menjalankan pemerintahan, dengan tujuan utama untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, *Maja Labo Dahu* menjadi simbol harmonisasi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang membentuk identitas moral masyarakat Bima hingga kini (Muhammad Ilham, *Islam dan Budaya.* H. 11).

Pada masa kesultanan, *Maja Labo Dahu* menjadi sumber kekuatan batin bagi para pemimpin dan rakyat dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya membentuk landasan moral dan etika dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, maupun beragama. Prinsip *malu* dan *takut* kepada Tuhan senantiasa menjadi pengingat agar setiap tindakan didasari oleh kejujuran, keadilan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Berangkat dari keyakinan yang mendalam terhadap nilai-nilai *Maja Labo Dahu* inilah, Kesultanan Bima mencapai masa kejayaannya. Pemerintahan berjalan dengan tertib, masyarakat hidup dalam keharmonisan, dan nilai spiritual Islam terintegrasi kuat dengan adat serta budaya lokal. Dengan demikian, *Maja Labo Dahu* bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga fondasi bagi kemajuan politik, sosial, dan budaya Kesultanan Bima pada masa itu. Dengan proses dakwah yang panjang oleh Sultan Abdul Qahir, maka agama Islam menjadi agama mayoritas di Bima hingga sekarang. Sayangnya filosofi *Maja Laabo Dahu* pada zaman sekarang sudah jarang diterapkan oleh masyarakat Bima dan hanya sebagian saja yang menerapkanya (M. Fachrir Rachman, *Islam di Bima Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan Perkembangan sampai Masa Kesultanan* h. 98).

4. SIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjalanan Sultan Abdul Qahir hingga memeluk agama Islam melalui proses yang cukup panjang dan pelik. Abdul Qahir terlibat konflik internal dengan pamannya Salisih. Salisih menginginkan kekuasaan hingga berniat membunuh keponakannya, Abdul Qahir. Abdul Qahir kemudian melarikan diri hingga tiba di Makassar dan akhirnya memeluk Islam
2. Abdul Qahir merupakan raja pertama yang memeluk Islam. Ia banyak berkontribusi terhadap perkembangan wilayah Bima. Di bidang dakwah, Sultan Abdul Qahir berhasil membangun masjid pertama yaitu Masjid Kamina yang dijadikan sebagai sarana dakwah dan sekaligus pendidikan. Di bidang kebudayaan, berhasil tercipta pakaian yang sesuai syari'at Islam yaitu busana Rimpu untuk menutupi seluruh tubuh wanita muslimah di Bima.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, L. Massir Q., 1981. BO: *Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima. Mataram: Depdikbud.*

Abdullah, M. Saleh AN, Nassir Q. 1997. *Bingkisan Bagi Penulis Sejarah Bima.* Bima.

Achmad BA, Abdullah. 2000. *Kerajaan Bima dan Keberadaannya.* Raba-Bima, 2000.

Abdullah, Massir Q. 1982. *BO: suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima.* Mataram: Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat, Stensil, ii-35 hlm.

Amin, Ahmad. 1971 *Sedjarah Bima: Sedjarah Pemerintahan dan serba-serbi Kebudayaan Bima.* Bima, Stensil, 93 hlm.

Andaya, L. Y. 1981. *The Heritage of Arung Palaka: a history of south Sulawesi (Celebes) in the seventeenth century.* The Hague: Nijhofff, ix-353 hlm. (VKI, 91)

A, Rauf Ahmad. 1988. "*Perkembangan Agama Islam di Bima pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin".* Skripsi. Fakultas Adab IAIN Alauddin. Ujung Pandang.

Asniati. 2020. Peranan Sultan Mardan Ali di Kesultanan Buton: 1647-1654. *Journal Idea of History,* Volume 3 Nomor 1, https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/history/article/view/995

Aulia, Rihlah Nur. 2013. Rimpu: *Budaya dalam Dimensi Busana Bercadar Perempuan Bima,* dalam jurnal studi Al-Qur'an; *Membangun Tradisi Berpikir Qur'ani.* Vol. 9. No. 2. Epstein, Louis M., 1967. Sex, Laws and cotums in Judaism: Ktav Publishing House, Inc. New York.

Bakri, H. M. Saleh. 1976. *Ringkasan Sejarah Perkembangan Agama Islam di Bima dan Ihktisar Sejarah Bima.* Bima.

Chambert-Loir, Henri. 1982. *Syair Kerajaan Bima.* Jakarta: EFEO, 246 hlm. (Naskah dan Dokumen Nusantara, 3)

_____1983."Sumber Melayu tentang Sejarah Bima", dalam *Citra Masyarakat Indonesia,* Jakarta: Sinar Harapan, h. 42-55

_____1985. *Ceritera Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-dewa.* Bandung: Angkasa-EFEO, 177 hlm. (Naskah dan Dokumen Nusantara, 5)

_____1994. "State, City, Commerce: the case of Bima", Indonesia, 57 (April 1994): 73-88.

Haris, Tawaluddin. 1997. *Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima*. Jakarta: Pendidikan Departemen dan Kebudayaan RI.

Harap, A. Salim. 1976. *Sejarah Penyiaran Islam di Asia Tenggara.* Medan: Islamiah.

Haris, Tawaluddin. 1990. *Sejarah Tradisional di Indonesia*: Bima.

Haris, Tawalinuddin, dkk. 1997. *Kerajaan Tradisional Indonesia; Bima.* Jakarta: CV Putra Sejati Raya.

Haris, Tawalinuddin . 2006. Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. 08. No. 01: 17-31.

H, Yuni. 2021. Kesultanan Buton Pada Masa Pemerintahan Sultan Anharuddin: 1823-1824. *Journal Idea of History,* Volume 4 Nomor 2, https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/history/article/view/1463

Ismail. 2008. *Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1940-1950).* Bogor: CV Binasti.

Ismail M. Hillir. 1998. *Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara* Bima.

Ismail, M. Hilir . 2002. *Sejarah Mbojo Bima* (dari jaman naka ke jaman kesultanan)

Jurdi, Syarifuddin. 2011. *Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima.* Makassar: Aluddin University Press.

Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah.* Jakarta: Gramedia.

Kasman. 2016. Peranan Sultan Abdul Qahir dalam Pengembangan Islam di Bima. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 07. No. 10 : 230-332

Loir, Henry Cambert dkk. 2010. *Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima.* Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan dan Parawisata.

Majelis adat Dana Mbojo. 2011. *Sejarah Masuk Islam Tanah Bima.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Mahyudin, Aliuddin & Siti Nurbaiti (eds.). 1984. *Silsilah dari Bima.* Jakarta: Dep. P & K, Proyek penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 84 hlm.

Mulyadi, Sri Wulan Rudjiati & H. Siti Maryam R. Salahuddin. 1990-92. *Katalogus Naskah Melayu Bima.* Bima: Yayasan Museum Kebudayaan "sampa Raja", 2 Jilid, viii-54 & xi-80 hlm.

_____1993. *Bandar Bima.* Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, viii-124 hlm.

_____1993. *Upacara dan Busana Adat Bima dalam Naskah Abad ke-18 dan ke-19 Daerah Nusa Tenggara Barat.* Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, vii-86 hlm.

Nashihah, Duratun. 2020. Kesultanan Buton Pada Masa Pemerintahan Sultan La Sangaji: 1591-1597. *Journal Idea of History,* Volume 3 Nomor 1, https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/history/article/view/1002

Nata, Abuddin. 2008. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Noorduyn, J. 1956. "De islamisering van Makassar", *BKI* 112 (3), h. 247 dst.

_____1965. "Origins of south Celebes Historical Writing", dalam Soedjatmoko e.a. (eds.), *An Introduction to Indonesian Historiography.* Ithaca: Cornell University Press, h. 137-155.

Rahman, Marwan. 2020. Agama Islam di Muna Pada Masa Pemerintahan Raja Titakono:1600-1625. *Journal Idea of History,* Volume 3 Nomor 1, https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/history/article/view/1000

Salahuddin, Siti Maryam R. 2015. *Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet, I; Bima: Sampa Raja Bima).

Sartina. 2023. Tokoh dan Islamisasi di Pulau Kabaena: 1920-1962. *Sorume: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Volume 1 Nomor 1, https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/sorume/article/view/2156

Sewang, Ahmad M. 2014. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII).* Yogjakarta: DIVA Press.

Taruna, Adanang. 1996. "Sultan Abdul Hair" *Majalah Harmoni,* NO. 121, Th. Ke VII, I Desember.

Yatim, Badri. 2015. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Raja Wali Pers.

Yunus, Abd. Rahim. 2014. *Sejarah Awal Masuk Islam di Selayar.* Skripsi. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Humaniora UIN Alauddin. Makassar.

DAFTAR INFORMAN

H. Sarifuddin, S.Sos., (wawancara 2 Februari 2024)
Ruslan Muhammad S.Sos., (Wawancara 1 Januari 2023)
Ibrahim Mahmud (Wawancara 6 Juni 2024)
Muhammad Putra Ferryandi (Wawancara 8 Juli 2024)